

STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN: MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF DI INDONESIA

Afrian Tito Setyawan¹, Erina Kusumawati^{1*}, Julfa Luthfiya Fitri¹, Miftakhul Asna¹, Rona Martilisa¹, Siti Nur Laili¹, Bagus Setyawan¹

¹UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Email Corresponding Author: erinakusumawati32@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata berkelanjutan dan inklusif menjadi arah strategis dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia yang bertujuan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pengembangan pariwisata yang mampu menjawab tantangan keberlanjutan dan inklusivitas di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi studi kasus dan tinjauan literatur (*literature review*). Studi kasus dilakukan pada beberapa destinasi wisata yang telah mengimplementasikan prinsip pariwisata berkelanjutan, seperti Desa Wisata Nglanggeran (Yogyakarta) dan Taman Nasional Komodo (NTT). Sementara itu, literature review digunakan untuk menelaah teori, kebijakan, dan praktik terbaik dari berbagai referensi ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang berhasil menekankan pada penguatan kelembagaan lokal, kolaborasi multipihak, serta perencanaan berbasis potensi lokal dan konservasi. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pariwisata nasional lebih adaptif terhadap konteks lokal dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan pariwisata yang adil dan lestari.

Kata kunci: pariwisata berkelanjutan, inklusif, strategi kebijakan

ABSTRACT

Sustainable and inclusive tourism represents a key policy direction in Indonesia's national development agenda, aiming to balance economic growth with environmental preservation and social equity. This study explores policy strategies that promote sustainable and inclusive tourism development through a qualitative approach, combining case studies and literature review. Case studies were conducted on two destinations: Nglanggeran Tourism Village in Yogyakarta and Komodo National Park in East Nusa Tenggara, both of which exemplify effective integration of sustainability principles. The literature review examined relevant theories, policy frameworks, and best practices from scholarly sources and official documents. Data were analyzed using content analysis to identify key themes and strategic patterns. The findings reveal that effective policy strategies emphasize community empowerment, multi-stakeholder collaboration, local resource-based planning, and institutional strengthening. The study recommends adaptive and participatory policy frameworks that embed local contexts and community roles at the core of sustainable tourism development in Indonesia.

Keywords: sustainable tourism, inclusive development, tourism policy

History Article

Submitted 23 June 2025 | Revised 10 January 2026 | Accepted 24 January 2026

License and Copyright

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International CC BY-NC-SA 4.0



Website

<https://journal.bukitpengharapan.ac.id/index.php/JUPARITA/index>

Email

juparita@bukitpengharapan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang strategis dalam pembangunan nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya dan lingkungan serta menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan kepariwisataan di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan. Salah satu masalah yang dialami sektor pariwisata di Indonesia adalah ketimpangan pembangunan destinasi, kerusakan lingkungan wisata akibat pelanggaran yang sering dilakukan pengunjung, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat lokal dan kelompok rentan dalam sektor pariwisata. Ketimpangan ini dapat menghambat upaya untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Belum terdapat observasi pada salah satu wisata secara langsung. Urgensi pada riset ini dapat dilihat dari pentingnya perumusan strategi kebijakan yang mampu menyelaraskan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pengembangan sektor kepariwisataan. Penelitian ini penting karena dapat memberikan rekomendasi konkret dalam merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Urgensi pada riset ini semakin nyata dengan adanya tekanan global untuk mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pascapandemi 19 yang melanda dunia pada tahun 2019. Pandemi menjadi hal yang reflektif untuk sektor pariwisata, karena menunjukkan betapa rentannya industri ini terhadap krisis global. Pada tahun 2019 juga menandai peningkatan diskursus mengenai transformasi pariwisata ke arah yang lebih hijau, digital dan inklusif.

Pariwisata berkelanjutan dan inklusif di Indonesia mulai berkembang terutama pada tingkat wacana kebijakan dan akademik. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPNAS), dan mengusung program destinasi super prioritas yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan yang cocok untuk mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, masyarakat lokal dapat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari kegiatan pariwisata, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dan adil.

Prinsip berkelanjutan diterapkan dengan menjaga kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kearifan tradisional sebagai bagian dari daya tarik wisatawan. Beberapa kebijakan yang dilakukan sebaiknya diperkuat melalui regulasi yang mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, secara intensif bagi pelaku usaha yang mendapatkan standar ramah lingkungan yang inklusif. Serta adanya kolaborasi dari pemerintah, swasta dan komunitas lokal. Pengembangan infrastruktur yang inklusif seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan perlu menjadi prioritas agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dan menikmati manfaat dari sektor pariwisata. Dengan kebijakan ini, pariwisata Indonesia dapat tumbuh tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep pariwisata berkelanjutan telah menjadi wacana utama dalam pembangunan sektor pariwisata global. Menurut United Nations World Tourism Organization (UNWTO, 2013), pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan destinasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip-prinsip utama dalam pariwisata berkelanjutan mencakup keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dalam konteks Indonesia, isu ini mulai menjadi perhatian utama dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Kemenparekraf, 2020), meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan, terutama menyangkut kesenjangan kapasitas antarwilayah dan kurangnya partisipasi komunitas lokal.

Sementara itu, pariwisata inklusif menjadi pendekatan yang semakin penting dalam merespons ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata. Scheyvens dan Biddulph (2018) menekankan bahwa pariwisata inklusif bertujuan untuk melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses dan hasil pembangunan pariwisata. Dengan pendekatan ini, pembangunan pariwisata tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, penguatan akses, dan penciptaan kesempatan kerja yang adil. Hall (2007) menyatakan bahwa inklusivitas dalam sektor pariwisata dapat dicapai melalui perencanaan yang berbasis masyarakat (*community-based planning*) dan kepemilikan lokal atas aset dan sumber daya wisata.

Strategi kebijakan menjadi elemen kunci dalam menciptakan sistem pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan publik yang baik harus mampu merespons tantangan lokal, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hall (2008) menyebutkan bahwa formulasi kebijakan yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap dinamika multiaktor dan konteks lokal. Di Indonesia, kecenderungan pendekatan kebijakan yang bersifat *top-down* sering kali menyebabkan ketidaksesuaian antara program nasional dan kebutuhan spesifik di tingkat destinasi. Putra (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang melibatkan komunitas secara langsung, seperti pembentukan badan pengelola lokal dan pengembangan wisata berbasis potensi desa, terbukti lebih berhasil dalam mendorong keberlanjutan. Hal ini juga sejalan dengan temuan Yasar (2020) yang menyebutkan bahwa model pengelolaan berbasis kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal menjadi praktik terbaik dalam beberapa destinasi wisata seperti Labuan Bajo.

Dengan demikian, kajian literatur menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, memperkuat peran serta masyarakat, serta disusun berdasarkan pendekatan berbasis data dan kontekstual. Pemahaman mendalam terhadap praktik terbaik dari berbagai studi kasus dan teori kebijakan menjadi dasar penting dalam menyusun kerangka strategis yang mampu menjawab tantangan dan peluang pengembangan pariwisata di Indonesia.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kombinasi antara *studi kasus* dan *literature review*. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi kebijakan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Studi kasus difokuskan pada dua destinasi wisata yang dinilai berhasil menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, yaitu Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta dan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi studi kasus didasarkan pada keberhasilan mereka dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan pariwisata. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, laporan resmi, dan wawancara semi-struktural dengan pengelola destinasi, pemerintah daerah, serta pelaku wisata lokal. Sementara itu, kajian literatur dilakukan untuk menelaah berbagai teori, kebijakan, dan praktik terbaik yang relevan dengan isu pembangunan pariwisata berkelanjutan dan inklusif. Sumber literatur mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga pemerintah dan internasional, serta dokumen kebijakan strategis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama, merumuskan pola kebijakan yang efektif, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam konteks kebijakan nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PEMETAAN STRATEGI KEBIJAKAN SAAT INI

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan. Salah satu kebijakan utama adalah pengembangan “10 Bali Baru”, yang merupakan proyek untuk menciptakan sepuluh destinasi wisata unggulan di luar Bali agar potensi pariwisata nasional tidak hanya terpusat di satu daerah. Program ini bertujuan menciptakan pemerataan destinasi wisata yang berkualitas tinggi dan berdaya saing internasional. Lima dari sepuluh destinasi tersebut telah ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Proyek ini menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur dasar seperti bandara, jalan, pelabuhan, dan sanitasi, sekaligus mendorong peningkatan sumber daya manusia, promosi berskala nasional dan internasional, serta kolaborasi dengan investor swasta untuk pembangunan akomodasi dan fasilitas wisata.

Selain itu, pemerintah mengimplementasikan program desa wisata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan. Program ini mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas, di mana pelestarian budaya lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal dijadikan sebagai daya tarik utama. Desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi melalui pariwisata, tetapi juga mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan sosial budaya agar tercipta pariwisata yang berkelanjutan. Dalam pengembangannya, pemerintah memberikan pelatihan, pendampingan, serta bantuan infrastruktur ringan bagi desa-desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata agar mampu mandiri secara ekonomi sekaligus menjaga karakter lokalnya.

Digitalisasi promosi pariwisata menjadi strategi penting lainnya yang diadopsi oleh pemerintah seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Pemerintah memanfaatkan media sosial, situs resmi pariwisata nasional, dan platform digital lainnya untuk memperkenalkan destinasi wisata kepada publik global dan domestik. Digitalisasi tidak hanya sebatas promosi, tetapi juga mencakup sistem pemesanan daring, pengelolaan data wisatawan, serta pemberian ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk terhubung langsung dengan konsumen melalui platform e-commerce. Langkah ini sejalan dengan transformasi digital yang tengah digalakkan dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata sebagai salah satu sektor andalan Indonesia.

Kebijakan pariwisata yang telah dilaksanakan menunjukkan upaya integratif lintas sektor, terutama dengan sektor lingkungan hidup, sosial, budaya, dan teknologi. Dalam hal ini, pengembangan destinasi wisata tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Misalnya, pembangunan di kawasan DSP diwajibkan memperhatikan aspek kelestarian ekosistem, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dalam penyusunan tata ruang dan pengelolaan dampak lingkungan, termasuk pemantauan terhadap pengelolaan limbah dan konservasi kawasan.

Dari sisi sosial budaya, keterlibatan masyarakat lokal sangat diutamakan agar mereka tidak menjadi penonton dalam pembangunan pariwisata, melainkan menjadi aktor utama. Partisipasi masyarakat dijamin melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bertugas mengelola aktivitas pariwisata di desa masing-masing. Pemerintah juga terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui festival, pertunjukan seni, dan pelestarian arsitektur tradisional yang dijadikan bagian dari atraksi wisata. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara sektor pariwisata dengan sosial dan budaya yang menjadi ciri khas tiap destinasi.

Sementara itu, integrasi dengan sektor teknologi informasi terlihat dari upaya digitalisasi berbagai aspek pariwisata. Pemerintah tidak hanya mengembangkan promosi daring, tetapi juga mendorong pelaku wisata untuk menggunakan aplikasi digital dalam pengelolaan usaha. Hal ini menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah untuk meningkatkan visibilitas produk mereka secara nasional maupun internasional. Teknologi juga digunakan dalam

sistem manajemen destinasi, seperti pemantauan kunjungan wisatawan, sistem reservasi daring, serta pengelolaan data untuk keperluan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Namun demikian, meskipun strategi keterpaduan lintas sektor telah dirancang, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah dominasi orientasi ekonomi yang kerap mengesampingkan aspek pelestarian lingkungan dan budaya, fragmentasi data antarinstansi, serta lemahnya sistem evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga pemerintah pusat dan daerah, harmonisasi regulasi antarsektor, serta peningkatan kapasitas pelaku pariwisata lokal agar mampu mengikuti perkembangan kebijakan dan teknologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan pariwisata Indonesia saat ini telah diarahkan pada pembangunan yang holistik dan lintas sektor. Meskipun pelaksanaannya belum sempurna dan masih perlu pembenahan, arah kebijakan ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

4.2. Tantangan dan Hambatan Implementasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan pariwisata adalah suatu proses pembangunan di daerah tujuan wisata berupa pengembangan atraksi atau objek wisata, pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pariwisata. Dasar pembangunan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus mengacu pada perencanaan, pengembangan dan arah pengelolaan yang jelas agar semua potensi yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata dapat diberdayakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang matang perlu dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Perencanaan ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata. Selain itu, pengembangan pariwisata harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas publik lainnya. Pengembangan pariwisata juga harus berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pengunjung, serta memberikan manfaat ekonomi. Indikator dari perkembangan pariwisata bisa dilihat dari jumlah pengunjung yang berwisata dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan bahkan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi jumlah pengunjung, pariwisata tersebut dapat dikatakan sudah berkembang dengan baik.

Akan tetapi, pembangunan industri pariwisata di Indonesia mungkin masih mengalami beberapa sedikit gangguan dan tantangan dalam implementasinya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

4.2.1 Kurangnya Sinergi Antar Instansi Pemerintah

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan. Pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut.

Pembicaraan tentang pengembangan objek wisata tidak terlepas dari peranan pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, yang sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Peran pemerintah sangat penting, terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan infrastruktur, manajemen dan keamanan yang baik dalam proses pengembangan pariwisata guna

terciptanya suatu objek pariwisata yang mempunyai daya tarik dan daya jual baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tata kelola pariwisata akan berdampak pada lingkungan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah. Masalah dari tata kelola pariwisata yaitu pengembangan fasilitas pariwisata yang tidak terkontrol dengan baik dan kegiatan kepariwisataan yang memberikan dampak terhadap situs-situs warisan yang seharusnya dilestarikan. Kemudian, sektor pengembangan infrastruktur akan mengancam keaslian pariwisata yang di setiap daerah pasti akan berbeda. Faktor iklim ekstrem dan bencana alam yang merusak lingkungan akibat tidak baiknya tata kelola pariwisata daerah. Pemerintah daerah pun sering menargetkan jumlah pengunjung yang banyak tanpa memikirkan daya tampung dalam setiap kunjungan pariwisata. Pariwisata banyak menyediakan keuntungan yang lebih besar ketimbang masyarakat setempat.

Peluang yang didapatkan dari tata kelola pemerintahan daerah akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat lokal sebagai penjaga asli (seperti pemilik, pengelola, pendidik, pencerita) serta fasilitas warisan dunia secara aktif nantinya dalam kepariwisataan secara berkelanjutan seperti agrowisata, ekowisata, dan wisata spiritual. Kemudian, pengembangan baru dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal seperti sistem pertanian, varietas lokal, kegiatan pascapanen, dan wisata kuliner akan sangat terasa oleh masyarakat lokal.

4.2.2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat Lokal

Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat dan pengembangan kepariwisataan, dibutuhkan sebuah wadah yang dibangun atas kesadaran dan keswadayaan masyarakat. Tujuan wadah organisasi ini adalah untuk mengembangkan pariwisata dengan prinsip kesadaran ekologis sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan dan tidak merusak potensi lokal yang ada. Pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni yang dimiliki oleh kelompok masyarakat memiliki peranan penting dalam menyadarkan masyarakat luas akan pentingnya pariwisata. Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan paradigma konservasi dan bukan eksploitasi seperti yang berlangsung sejak lama.

Industri pariwisata memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap masyarakat lokal, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dampak ini dapat berupa peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya dan tradisi, hingga perubahan dalam struktur sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga memberikan ruang untuk memengaruhi arah pengembangan pariwisata agar sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan mereka. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan di Kampung Arab Panjunan. Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya, tradisi, dan identitas, sambil tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.

Salah satu tantangan utama dalam melibatkan masyarakat guna pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menunjukkan sikap skeptis atau bahkan resistensi terhadap rencana pengembangan pariwisata. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya transparansi informasi, pengalaman negatif sebelumnya dengan pihak pemerintah atau pengelola wisata, hingga kekhawatiran akan dampak negatif pariwisata terhadap kehidupan dan lingkungannya. Ketidakmerataan akses informasi dan perbedaan persepsi di antara masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam membangun partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, mungkin masih terdapat beberapa warga yang merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengembangan dan kurang memiliki rasa memiliki terhadap proyek. Kesibukan sehari-hari, kekhawatiran akan dampak negatif, dan kurangnya kepercayaan terhadap pihak-pihak yang terlibat juga menjadi faktor yang menghambat partisipasi aktif masyarakat.

4.2.3. *Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah*

Kesadaran berwisata dan potensi keuntungan ekonomi dalam industri pariwisata ini memengaruhi geliat kepariwisataan di Indonesia. Permulaan munculnya dapat dilacak sejak akhir tahun 1960-an. Ketika itu, pemerintah Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Untuk mengaplikasikan rencana ini, pemerintah merumuskannya ke dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I sampai V. Meskipun pengembangan industri pariwisata telah dirancang secara terencana sejak tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kepariwisataan baru dikeluarkan pada tahun 1990 melalui Undang-Undang No. 9 tahun 1990. Ini terjadi karena, pada saat itu kebijakan politik pemerintah menempatkan industri pariwisata sebagai sektor utama untuk meningkatkan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi.

Meski telah direncanakan dan dilaksanakan sejak tahun 1960-an, dampak industri pariwisata bagi pembangunan nasional belum menunjukkan hasil signifikan. Alasannya adalah persepsi masyarakat Indonesia yang melihat pariwisata secara negatif. Pariwisata cenderung diasosiasikan dengan aktivitas yang melanggar norma-norma kesucilaan dan merusak kebudayaan. Banyak tokoh agama dan pemuka masyarakat tidak berpihak kepada pembangunan pariwisata karena persepsi demikian. Ditambah lagi, informasi yang utuh tentang pariwisata masih sangat terbatasnya diterima oleh masyarakat. Alasan lainnya adalah, kehadiran industri pariwisata di masa-masa awal yang cenderung berorientasi pada penerimaan devisa negara menyebabkan masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat secara riil.

Ketimpangan pembangunan antardaerah di Indonesia kerap kali tercermin dari perbedaan laju pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Dalam konteks pembangunan industri pariwisata, hal ini menjadi isu yang krusial. Industri pariwisata memiliki potensi besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pengembangan infrastruktur. Namun, jika pengembangan sektor ini hanya terfokus di wilayah-wilayah tertentu seperti Bali, Yogyakarta, atau Labuan Bajo, maka ketimpangan pembangunan antardaerah akan semakin tajam. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata juga perlu memperhatikan keselarasan dengan pertumbuhan penduduk setempat. Jika tidak, maka meskipun pariwisata berkembang pesat, manfaat ekonominya tidak akan merata dan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Oleh karena itu, strategi pembangunan industri pariwisata perlu diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi namun masih tertinggal secara ekonomi, agar dapat mendorong pemerataan pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah di Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan industri pariwisata yang inklusif dan berkeadilan dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan daerah dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.2.4. *Ketergantungan Pada Pariwisata Massal*

Pariwisata massal merupakan salah satu strategi sederhana untuk mempercepat kunjungan wisatawan yang dapat dilakukan oleh pengelola destinasi pariwisata. Analisis tren menjadi kunci untuk membuka produk pariwisata yang digemari pengunjung, meskipun terkadang kurang memperhatikan kualitas, pengaruh, serta dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan pengunjung. Ambisi yang sifatnya ekonomistik telah mendominasi, sehingga komersialisasi segala potensi tidak terhindari. Indonesia sendiri menobatkan pariwisata sebagai salah satu sektor perekonomian yang penting karena keberadaannya dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya. Pariwisata dapat menjadi solusi ekonomi di banyak daerah yang memiliki potensi wisata yang tinggi, baik wisata alam maupun buatan.

Segala potensi sumber daya, baik alam, budaya, maupun sosial, dikomersialisasikan demi keuntungan jangka pendek. Hal ini menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap arus wisatawan dalam jumlah besar (mass tourism). Ketergantungan ini menjadi persoalan serius

karena menjadikan sektor pariwisata sebagai satu-satunya tumpuan ekonomi daerah. Ketika terjadi krisis, seperti pandemi COVID-19, bencana alam, atau gangguan sosial, yang mengakibatkan turunnya kunjungan wisatawan, ekonomi lokal pun terpuruk karena tidak memiliki fondasi ekonomi yang beragam. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan destinasi wisata baik alam maupun budaya, menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah mencanangkan program pengembangan destinasi super prioritas sebagai upaya pemerataan pembangunan pariwisata di luar Bali. Namun, bila pendekatan yang digunakan tetap bersifat massal tanpa perencanaan yang berkelanjutan, maka yang terjadi bukanlah peningkatan kesejahteraan, melainkan pengulangan siklus ketergantungan ekonomi yang rapuh. Oleh karena itu, pembangunan industri pariwisata di Indonesia harus bertransformasi dari pendekatan pariwisata massal menuju pariwisata berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, ketergantungan pada pariwisata massal dapat dikurangi dan sektor ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi yang tangguh dan berkeadilan bagi semua pihak

4.3. Studi Kasus Best Practice

Salah satu best practice implementasi strategi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif di Indonesia dapat ditemukan pada Provinsi Bali melalui penerapan E-Government dalam pengelolaan pariwisata digital. Pemerintah Provinsi Bali berhasil memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan sistem yang mendukung transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam sektor pariwisata. Melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali, pemerintah menyediakan layanan terpadu seperti informasi destinasi, e-ticketing, pemesanan akomodasi, transportasi daring dan luring, hingga integrasi sistem pembayaran non-tunai. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan bagi wisatawan, tetapi juga mendorong partisipasi pelaku usaha lokal melalui marketplace produk pariwisata Bali. Pemerintah daerah juga aktif berkolaborasi dengan akademisi dan lembaga riset dalam menciptakan sumber daya manusia yang inovatif berbasis teknologi, serta mengembangkan ekosistem pariwisata yang adaptif terhadap transformasi digital. Studi kasus Bali ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor dapat menjadi model efektif dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat local.

Studi kasus Desa Wisata Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, menunjukkan keberhasilan implementasi konsep Community-Based Tourism (CBT) dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif. Desa ini dikelola secara mandiri oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, hingga pelayanan wisata. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan dan budaya. Berdasarkan survei tingkat kepuasan pengunjung, diperoleh nilai Customer Satisfaction Index (CSI) sebesar 77,30%, yang menunjukkan penerimaan positif terhadap penerapan CBT. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai lini pengelolaan mencerminkan prinsip inklusivitas dalam pariwisata, di mana masyarakat bukan hanya sebagai objek, melainkan subjek utama pembangunan. Meskipun masih terdapat tantangan seperti aksesibilitas transportasi umum, keterbatasan fasilitas pendukung, dan belum optimalnya penggunaan BUMDes, praktik pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran tetap menjadi contoh baik bagaimana pariwisata berbasis masyarakat dapat membangun ekonomi lokal secara berkelanjutan dan meningkatkan rasa kepemilikan serta tanggung jawab terhadap pelestarian desa wisata.

Program WWF Signing Blue di kawasan wisata bahari Labuan Bajo merupakan contoh konkret praktik kebijakan pariwisata bertanggung jawab yang dapat dijadikan best practice dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Melalui pendekatan ini, para pelaku industri pariwisata seperti Dive Komodo diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Inisiatif ini tidak hanya berhasil menurunkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh wisatawan dan operator selama kegiatan penyelaman, tetapi juga meningkatkan kesadaran konservasi baik di kalangan pengelola

maupun wisatawan. Program ini turut mendorong edukasi tentang pentingnya perlindungan ekosistem laut, seperti larangan melepaskan jangkar sembarangan dan anjuran penggunaan mooring buoy untuk menjaga keberlanjutan terumbu karang. Meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya pemahaman konservasi di kalangan nelayan dan kurangnya minat wisatawan terhadap produk UMKM lokal, implementasi Signing Blue tetap menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor dan pendekatan berbasis tanggung jawab lingkungan dapat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pelestarian sumber daya dan pemberdayaan komunitas lokal.

Ketiga studi kasus di atas, yakni Implementasi E-Government di Provinsi Bali, Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran berbasis Community-Based Tourism, dan program Signing Blue di Labuan Bajo, menunjukkan bahwa strategi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif di Indonesia dapat diwujudkan melalui pendekatan yang adaptif terhadap konteks lokal, kolaboratif lintas sektor, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Keberhasilan Bali dalam membangun sistem digital pariwisata menunjukkan pentingnya transformasi teknologi dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas, sementara Nglanggeran menegaskan peran vital partisipasi masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan pariwisata. Di sisi lain, Labuan Bajo membuktikan bahwa pendekatan konservasi berbasis tanggung jawab sosial dan lingkungan mampu menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan dan beretika. Ketiganya memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, tetapi juga oleh sinergi antara teknologi, budaya, lingkungan, dan masyarakat lokal, yang jika dirumuskan secara tepat dalam strategi kebijakan nasional, dapat menjadi pilar utama mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

4.4. Strategi Penguatan Kebijakan

Pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dan inklusif membutuhkan strategi kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan masa kini, tetapi juga antisipatif terhadap kebutuhan jangka panjang. Keberhasilan sektor pariwisata sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, efektivitas implementasi, serta kemampuan adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal. Berbagai tantangan di lapangan tidak hanya muncul dari aspek teknis, tetapi juga dari lemahnya kelembagaan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya kolaborasi lintas sektor.

Strategi penguatan kebijakan menjadi krusial untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Rekomendasi kebijakan perlu disusun secara sistematis, berbasis data, dan melibatkan partisipasi berbagai aktor. Proses ini mencakup integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap tahapan kebijakan, pemberdayaan kelembagaan lokal, penguatan indikator keberlanjutan, serta mendorong kolaborasi multipihak secara aktif dan setara.

Pembahasan berikut menguraikan empat rekomendasi strategis yang dapat dijadikan pijakan dalam memperkuat arah kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia. Keempat aspek tersebut diharapkan mampu memperkuat landasan kelembagaan dan sosial yang menjadi syarat utama terciptanya sistem kepariwisataan yang tangguh dan adil di tingkat lokal maupun nasional.

4.4.1. Integrasi Prinsip Triple Bottom Line dan Pengembangan Konsep Circle Bottom Line dalam Pariwisata

Konsep Triple Bottom Line (TBL) yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997 menjadi paradigma baru dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang tidak hanya berdasarkan keuntungan ekonomi (profit), tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan (planet) dan kesejahteraan sosial (people). Pendekatan ini menegaskan bahwa sektor ini tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap masyarakat lokal dan ekosistem destinasi. TBL mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan

masyarakat sipil, untuk mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara seimbang dalam setiap tahap kebijakan dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Penerapan TBL dalam kebijakan pariwisata menuntut adanya sinergi lintas sektor untuk memastikan bahwa pengembangan destinasi tidak menimbulkan ketimpangan sosial atau kerusakan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan pada kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu menunjukkan bahwa kebijakan yang mengabaikan dimensi sosial dan ekologis cenderung ditolak oleh masyarakat lokal dan menimbulkan konflik kepentingan. Sebaliknya, pendekatan yang melibatkan komunitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan dapat menciptakan harmoni antara konservasi dan aktivitas ekonomi wisata.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia dengan prinsip TBL menuntut kebijakan yang memprioritaskan penguatan kapasitas masyarakat lokal, peningkatan kualitas hidup, serta pelestarian lingkungan destinasi. Dewi dan Fitriani mencatat bahwa kebijakan pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas di sektor pendukung pariwisata (seperti perbankan mikro dan jasa lokal) dapat menjadi alat strategis dalam mewujudkan kesejahteraan jangka panjang. Pendekatan ini juga mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal yang tidak berkelanjutan.

Perusahaan di sektor makanan dan minuman yang terkait erat dengan pariwisata juga mulai mengintegrasikan prinsip TBL ke dalam praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pandin, dkk. Menunjukkan bahwa inisiatif CSR berbasis TBL berhasil memperbaiki infrastruktur dasar di daerah wisata, memperkuat hubungan sosial, serta mendukung konservasi lingkungan melalui pengelolaan limbah dan sumber daya alam lokal. Meskipun demikian, tantangan tetap muncul, terutama dalam menjaga kinerja ekonomi ketika menghadapi ketidakpastian pasar.

Menurut Ramadhani dan Ekaviana, konsep Circle Bottom Line mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika berbasis ekoteologi Islam. Pendekatan ini memberikan kerangka moral tambahan bagi pelaku kebijakan dan usaha pariwisata agar tidak hanya bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial-lingkungan, tetapi juga secara spiritual. Konsep ini sangat relevan di Indonesia, di mana spiritualitas dan kepercayaan lokal masih menjadi kekuatan budaya yang hidup dalam praktik pariwisata komunitas.

4.4.2. Pemberdayaan kelembagaan lokal dan pelatihan SDM

Pemberdayaan kelembagaan lokal memegang peran penting dalam menjembatani kebijakan nasional dengan dinamika di lapangan. Kelembagaan desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan koperasi lokal merupakan ujung tombak dalam mengelola destinasi secara langsung dan terlibat aktif dalam meningkatkan pengalaman wisatawan. Di Kabupaten Bandung Barat, keberadaan 32 Pokdarwis yang tersebar di berbagai desa merupakan representasi nyata dari kapasitas lokal dalam mengelola potensi wisata yang ada di wilayahnya. Pokdarwis bertugas menciptakan iklim kondusif pariwisata, menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta mendorong penerapan Sapta Pesona sebagai fondasi nilai dalam pelayanan wisata.

Kapasitas kelembagaan Pokdarwis yang telah memiliki pengakuan melalui Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten memungkinkan mereka menjadi mitra strategis dalam upaya pemulihan pariwisata. Namun, hasil observasi di lapangan menunjukkan masih adanya kendala yang signifikan. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan teknis dalam pengelolaan daya tarik wisata. Permasalahan umum yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman mengenai langkah-langkah perencanaan, pengemasan informasi destinasi, serta strategi promosi yang efektif. Rendahnya kualitas pelatihan menyebabkan ketidakmampuan Pokdarwis mengoptimalkan potensi wisata berbasis lahan lokal yang menjadi kekuatan desa.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak untuk mengakselerasi pariwisata berkelanjutan dan inklusif. Wibowo menegaskan bahwa pelatihan di sektor pariwisata harus mencakup peningkatan keterampilan teknis, literasi digital, serta penanaman nilai-nilai keberlanjutan dan etika pelayanan.

Pelaksanaannya di lapangan menunjukkan bahwa pelatihan berbasis partisipasi dan konteks lokal lebih berdampak dibandingkan dengan pelatihan yang bersifat top-down. Pengembangan SDM yang inklusif memungkinkan terciptanya inovasi dalam pengelolaan atraksi

wisata dan pelibatan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Pokdarwis yang aktif diberdayakan mampu mengembangkan produk wisata kreatif berbasis budaya lokal, mengorganisir sistem promosi terpadu, dan membentuk jejaring distribusi dengan pelaku pariwisata skala nasional. Peran ini menjadi sangat vital dalam membentuk identitas destinasi yang unik dan kompetitif.

Pemberdayaan kelembagaan lokal dan penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan strategi kebijakan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Keberadaan Pokdarwis dan struktur kelembagaan komunitas lainnya menjadi penggerak utama yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik lokal yang relevan dan berdampak langsung. Penguatan SDM melalui pelatihan berbasis kebutuhan riil di lapangan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif terhadap nilai keberlanjutan. Dengan membangun sinergi antara kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM, destinasi wisata tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.4.3. Penyusunan indikator keberlanjutan yang Terukur

Indikator keberlanjutan pariwisata merupakan alat ukur penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan pariwisata telah memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Penilaian berbasis indikator memungkinkan pemerintah dan pelaku industri memahami dampak jangka panjang dari aktivitas pariwisata terhadap sumber daya lokal. Sugiarto dan Widjojo menyusun model indikator nasional berbasis tiga dimensi utama, yaitu lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan konservasi energi; dalam bidang sosial meliputi partisipasi masyarakat dan pelestarian budaya; dan dalam bidang ekonomi seperti pendapatan lokal dan lapangan kerja langsung dari pariwisata.

Proses awal penyusunan indikator dimulai dengan identifikasi kondisi lokal dan potensi tantangan yang dihadapi oleh destinasi. Karakteristik geografis, budaya, dan sosial-ekonomi suatu daerah akan sangat menentukan relevansi indikator yang digunakan. Komalasari dan Herwangi melalui studi di kawasan wisata pesisir Pangandaran mengembangkan indikator yang mempertimbangkan aspek resiliensi masyarakat pesisir, integrasi pengelolaan pesisir berkelanjutan, dan pengendalian tekanan ekologis terhadap kawasan pantai. Penyesuaian ini penting agar indikator tidak bersifat normatif dan tetap kontekstual.

Indikator keberlanjutan juga harus bersifat kuantitatif agar dapat digunakan dalam proses evaluasi dan pemantauan secara berkala. Global Sustainable Tourism Council (GSTC) telah merilis daftar lebih dari 40 indikator universal, seperti rasio konsumsi air, jejak karbon, rasio tenaga kerja lokal, hingga jumlah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut Pramudya dan Hidayat, penggabungan metode Multidimensional Scaling (MDS) dan pendekatan partisipatif dalam menyusun indikator untuk destinasi desa wisata. Metode ini dinilai mampu menghasilkan alat ukur yang tidak hanya objektif, tetapi juga diterima oleh masyarakat lokal.

Validasi dan pemantauan indikator membutuhkan dukungan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pemerintah daerah dapat mengembangkan dashboard digital keberlanjutan yang menampilkan indikator-indikator utama secara real-time. Mariati dkk. Mencontohkan penggunaan indikator ini di Taman Nasional Komodo, di mana data disajikan dalam bentuk visual interaktif untuk memudahkan interpretasi hasil pengukuran oleh pemangku kepentingan, termasuk warga lokal dan sektor swasta. Keberhasilan pengukuran juga sangat ditentukan oleh ketersediaan data primer dan mekanisme pelaporan yang transparan.

Penyusunan indikator keberlanjutan yang terukur akan memberikan manfaat besar dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata. Indikator yang baik mampu memetakan kekuatan dan kelemahan destinasi sehingga strategi pengelolaan dapat diarahkan secara lebih efisien. Indikator ini juga membantu dalam proses perbaikan kebijakan melalui evaluasi periodik dan pelibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan indikator keberlanjutan bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen demokrasi data yang mendorong akuntabilitas dan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berjangka panjang

4.4.4. Mendorong Kolaborasi Multipihak

Pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu keterlibatan aktif dari berbagai elemen seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan kalangan akademik. Semua memiliki kompetensi dan sumber daya yang berbeda. Sehingga, jika disinergikan, akan menghasilkan dampak yang lebih luas dan mendalam. Pemerintah memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan menyediakan infrastruktur dasar. Pelaku usaha dapat memberikan investasi serta menciptakan inovasi produk wisata. Masyarakat sipil menjaga nilai-nilai budaya lokal dan lingkungan hidup. Akademisi memberikan dukungan riset dan evaluasi kebijakan yang berbasis bukti.

Kolaborasi multipihak terbukti mampu mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di desa-desa wisata yang sebelumnya tertinggal. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Andriani di Desa Tambaksari, Cilacap, menunjukkan bahwa keterlibatan bersama antar-elemen pentahelix menciptakan sistem manajemen wisata yang lebih efisien. Sinergi tersebut menghasilkan kegiatan pelatihan usaha kecil, promosi digital berbasis komunitas, hingga revitalisasi destinasi wisata alam berbasis konservasi. Pelibatan aktif dari warga setempat juga membuat hasil pembangunan lebih tahan dalam jangka panjang karena sesuai dengan kebutuhan lokal.

Peran masyarakat sipil dalam kolaborasi pariwisata tidak hanya sebatas pelaku pasif. Mereka juga menjadi mitra penting dalam penyusunan kebijakan lokal, pelestarian budaya, serta pengawasan dampak lingkungan. Menurut Safitri dkk. Konsultasi publik dan diskusi multi-aktor membantu meningkatkan kualitas perencanaan dan menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan wisata berbasis ekosistem. Masyarakat yang dilibatkan sejak awal cenderung lebih menerima kebijakan dan bersedia terlibat dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pelaku usaha dan akademisi turut memiliki kontribusi strategis. Pelaku usaha mendukung penciptaan nilai ekonomi melalui produk wisata yang inovatif dan menarik wisatawan. Akademisi memberi masukan berupa hasil penelitian tentang tren wisata, daya dukung lingkungan, dan prediksi dampak sosial-ekonomi. Susanty dan Murianto menguatkan pernyataan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pelatihan berbasis data hasil riset perguruan tinggi mempercepat peningkatan kapasitas kelembagaan lokal. Kegiatan tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil kerja sama lintas sektor.

Keberhasilan kolaborasi multipihak sangat dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi, komitmen jangka panjang, serta kejelasan peran masing-masing pihak. Setiap aktor perlu memahami kontribusi dan batas tanggung jawabnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Kolaborasi juga harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghargai. Pendekatan pentahelix bukan hanya strategi teknis, tetapi juga bentuk manajemen partisipatif yang menghormati semua pihak dalam proses pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemberdayaan kelembagaan lokal dan penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan strategi kebijakan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Keberadaan Pokdarwis dan struktur kelembagaan komunitas lainnya menjadi penggerak utama yang mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik lokal yang relevan dan berdampak langsung. Penguatan SDM melalui pelatihan berbasis kebutuhan riil di lapangan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif terhadap nilai keberlanjutan. Dengan membangun sinergi antara kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM, destinasi wisata tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang sosial yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Pengembangan pariwisata di Indonesia tidak dapat lagi hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus diarahkan pada model pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan hasil kajian dan studi kasus, dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan yang efektif dalam pengembangan kepariwisataan adalah kebijakan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat

lokal, dan kolaborasi multipihak. Destinasi wisata seperti Desa Wisata Nglanggeran dan Taman Nasional Komodo menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, perencanaan yang mempertimbangkan potensi lokal, serta tata kelola yang partisipatif dapat mendorong terciptanya sistem pariwisata yang tidak hanya lestari secara lingkungan, tetapi juga adil secara sosial dan ekonomi.

Kebijakan nasional perlu didesain secara lebih adaptif terhadap konteks lokal, serta membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat sebagai aktor utama pembangunan pariwisata. Tanpa pelibatan aktif dari masyarakat, kebijakan akan sulit terealisasi secara efektif di tingkat lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung penguatan kapasitas masyarakat, memperjelas pembagian peran antaraktor, dan menjamin distribusi manfaat yang merata. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pariwisata berkelanjutan dan inklusif di Indonesia bukan hanya menjadi wacana, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata sebagai bagian dari pembangunan nasional yang holistik dan berkeadilan.

REFERENSI

- Fushshilat, S. R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2022). Konsep Triple Bottom Line (TBL) pada Yayasan Allianz Peduli. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 3(1).
- Hall, C. M. (2007). *Tourism planning: Policies, processes and relationships*. Pearson Education.
- Hall, C. M. (2008). *Tourism planning: Policies, processes and relationships* (2nd ed.). Prentice Hall.
- Hidayat, T. (2023). Pemberdayaan kelompok sadar wisata melalui pendampingan sadar wisata dan tata kelola kelembagaan desa. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6).
- Ichsan, R. N., dkk. (2024). Digitalisasi destinasi sebagai strategi pengembangan promosi pariwisata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). Rencana induk pengembangan pariwisata nasional (RIPPARNAS).
- Khalim, A., & Hernawati, Y. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kampung Arab Panjunan Kota Cirebon. *Jurnal Pariwisata*, 524–530.
- Mariati, S., Parera, A. K., & Rahmanita, M. (2022). Analisis keberlanjutan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi wisata berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 27(2), 153–164.
- Nabal, A. R. J., & Djaja, K. (2022). Dampak kepariwisataan terhadap perubahan pola urbanisasi di Indonesia. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 17(1).
- Pramudya, W., & Hidayat, S. (2024). Persepsi wisatawan terhadap dampak pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul. *Indonesian Journal of Tourism Business and Entrepreneurship*, 1(1), 55–70.
- Putra, I. N. D. (2019). *Pariwisata berbasis masyarakat*. Udayana University Press.
- Putu, Y. N. (2020). Collaborative governance dalam kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1).
- Ramadhani, F. N., & Ekaviana, D. (2020). Circle bottom line: Mengkonstruksi akuntansi sosial-lingkungan dalam bingkai spiritualitas. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 5(1), 17–24.
- Scheyvens, R., & Bidulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609.
- Sri Sentanu, I. G. E. P., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1–20.
- Sugiarto, & Widjojo, M. M. H. (2023). Model keunggulan bersaing destinasi pariwisata Indonesia. Penerbit Andi.
- Syafera, A. (2024). Pengembangan DSP Labuan Bajo: Sebuah quantum leap. *Jurnal Pariwisata UGM*.

- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2013). Sustainable tourism for development guidebook.
- Yasar, M. (2020). Model kolaborasi dalam pengelolaan destinasi wisata Labuan Bajo. *Jurnal Administrasi Publik*.